
STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN KABUPATEN DONGGALA : PENDEKATAN TINDAKAN KOLEKTIF

Oleh :
Mukhtar Tallesang
(Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Donggala: Pendekatan Tindakan Kolektif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a). Strategi pemberdayaan nelayan apa saja yang telah berjalan selama ini; b). Kekuatan dan Kelemahan apa yang dikandung dari strategi-strategi pemberdayaan nelayan yang telah dijalankan selama ini di Kabupaten Donggala; dan c). Bagaimana Strategi Pemberdayaan Nelayan dengan menggunakan Pendekatan Tindakan Kolektif di Kabupaten Donggala. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemberdayaan nelayan di Kabupaten Donggala dengan menggunakan pendekatan tindakan kolektif.

Di Kabupaten Donggala terdapat 72 desa pesisir yang pada umumnya penduduknya masih terperangkap dalam kemiskinan dan untuk mengeliminasi sebagian kemiskinan yang menjerat masyarakat nelayan di Kabupaten Donggala haruslah dilakukan upaya dan strategi-strategi yang strategis melalui pendekatan-pendekatan yang relatif baru, salah satu diantaranya adalah Pendekatan Tindakan Kolektif (Collective Action Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan nelayan berpangkal pada kurangnya akses nelayan terhadap faktor produksi, yang diperparah oleh rusaknya sumber daya alam, faktor budaya, dan faktor kelembagaan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan jam kerja rendah, peralatan yang digunakan sangat sederhana, tidak adanya akses terhadap perubahan dan perkembangan teknologi, produksi rendah, modal terbatas, keterampilan yang terbatas, harga jual rendah, beban tanggungan relatif besar. Keadaan tersebut telah menciptakan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar nelayan. Program yang dilakukan secara parsial mengandung banyak ketidakadilan.

Keywords: Strategi Pemberdayaan Nelayan, Tindakan Kolektif, Kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir/nelayan yang telah dilakukan berupa; modernisasi perikanan, dan program-program pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan nelayan (penciptaan peluang-peluang kerja nonperikanan atau diversifikasi usaha perikanan) serta usaha untuk meningkatkan sumber daya ekonomi di desa-desa nelayan semakin meningkatkan ketergantungan nelayan yang terisolasi

(terbatas sumber daya ekonominya), karena upaya melakukan konversi pekerjaan tidak mudah ditempuh. Akhirnya, tekanan-tekanan terhadap sumber daya perikanan akan semakin meningkat seiring dengan membengkaknya jumlah pengangguran di desa, karena kegiatan nelayan menjadi satu-satunya alternatif kerja yang tersedia.

Menurut Mubyarto (1994) keberadaan masyarakat nelayan di Indonesia berada dalam strata tradisional, baik yang menekuninya sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan. Menempatkan nelayan di Indonesia

umumnya tergolong miskin, karena hasil yang diakumulasikan dari potensi yang ditekuni padahal bila dikaitkan dengan Program-Program yang pernah bersentuhan dengan masyarakat pesisir (Nelayan) sudah begitu banyak semisal Inpres Desa Tertinggal (IDT, Kredit Usaha Tani (KUT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Community Based Development (CBD) (Bone, 2003). Bahkan, menurut Fauzi (2003) bahwa sebenarnya langkah pemerintah untuk memberikan kredit kepada sektor kelautan sudah lama dilakukan.

Di Kabupaten Donggala terdapat 72 desa pesisir yang pada umumnya penduduknya masih terperangkap dalam kemiskinan dan untuk mengeliminasi sebagian kemiskinan yang menjerat masyarakat nelayan di Kabupaten Donggala haruslah dilakukan upaya dan strategi-strategi yang strategis melalui pendekatan-pendekatan yang relatif baru, salah satu diantaranya adalah Pendekatan Tindakan Kolektif (*Collective Action Approach*).

1.2 Masalah Penelitian

Dalam upaya menemukan suatu strategi baru pemberdayaan nelayan pada Kabupaten Donggala melalui pendekatan tindakan kolektif, penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan nelayan apa saja yang telah berjalan selama ini di Kabupaten Donggala
2. Kekuatan dan Kelemahan apa yang dikandung dari strategi-strategi pemberdayaan nelayan yang telah dijalankan selama ini di Kabupaten Donggala
3. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Nelayan dengan menggunakan Pendekatan Tindakan Kolektif di Kabupaten Donggala

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Masyarakat Pesisir Dan Nelayan

Secara historical-cultural, mengisahkan bahwa munculnya tatanan pranata masyarakat pesisir atau pantai berevolusi dalam beberapa fase, mulai dari munculnya masyarakat maritim, adanya tatanan masyarakat pantai dan mobilitas kaum nelayan sebagai pendukung budaya maritim (Razak, 2000).

Eksplanasi masyarakat pesisir atau masyarakat pantai tak bisa terlepas dari masyarakat maritim yang merupakan embrio dan sekaligus berakar pada kebudayaan maritim. Kebudayaan yang berhubungan dengan laut ini mengandung kompleksitas tersendiri, namun Mukhlis (1989) menyederhanakan dalam dua sisi pandang. Sisi pertama disebut, *maritime great tradition*, yang diwakili oleh para bangsawan, orang baik-baik (*tubaji*), *tukalumannyang* (orang-orang kaya) termasuk *pongawa*, para pemilik modal, dan penduduk perkotaan di kota-kota pantai. Sisi kedua diwakili oleh rakyat biasa yang disebut nelayan, para *sawi* (klien), pendukung *little tradition*. Merekalah yang dikenal sebagai nelayan “miskin”, yang hidup pas-pasan atau bahkan mungkin serba kurang. Merekalah yang umumnya dianggap sebagai pemilik kebudayaan maritime, bagi Mukhlis, ini merupakan suatu anggapan yang keliru.

Sedang yang dimaksud dengan masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bermukim di kawasan/wilayah pesisir (*coastal zone*), yaitu suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Benyamin, 1999).

Lebih lanjut, Benyamin (1999) menyatakan bahwa karakteristik yang juga menonjol pada masyarakat wilayah pesisir adalah pendapatan masyarakat

yang memiliki mata pencaharian pokok murni sebagai nelayan pada umumnya secara nasional masih sangat rendah. Hal ini berkaitan dengan masih bekerjanya lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) baik dilihat dari sisi permintaan (*demand side*) maupun dari sisi penawaran (*supply side*).

Dari sisi permintaan, rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas masyarakat disebabkan oleh adanya kekurangan modal. Kekurangan modal terjadi akibat rendahnya tingkat investasi masyarakat. Rendahnya investasi akibat rendahnya permintaan dan rendahnya permintaan karena rendahnya pendapatan.

Dari sisi penawaran juga terlihat bahwa rendahnya pendapatan akibat rendahnya produktivitas, yang ini disebabkan oleh kurangnya modal, yang ini akibat dari rendahnya investasi. Investasi rendah karena rendahnya tabungan, sedang rendahnya tabungan kembali akibat rendahnya pendapatan.

Sementara karakteristik social budaya yang menonjol adalah masih sangat kuatnya ikatan kekerabatan yang menjadi dasar organisasi social kemasyarakatan yang dibangun di atas tiga prinsip utama (Suwitha, 1991), yaitu: (1) prinsip ikatan kekerabatan; (2) prinsip ikatan komunitas atau ikatan wilayah; dan (3) prinsip ikatan sukarela. Sedang karakteristik social-budaya lain berdasarkan cermatan Sallatang (1999) adalah masih terdapatnya pelapisan sosial (*social structure*), yang menurutnya tersusun dalam dua lapis, yaitu lapisan atas (elit) dan lapisan bawah (non-elit) atau orang kebanyakan (*common people*). Lapisan elit adalah mereka yang memiliki atau menguasai fasilitas (materi dan non materi) yang memperoleh tempat tinggi (lebih tinggi) dalam system yang dianut. Semakin tinggi lapisan, semakin berat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

menduduki dan karenanya, semakin sedikit tempat yang tersedia. Lapisan bawah adalah mereka yang kurang memiliki atau menguasai fasilitas. Mereka ini, jumlahnya besar. Jika diamati lebih cerna, setiap lapisan diatas terdiri atas sedikitnya dua sub-lapisan. Pada lapisan atas (elit) terdapat sub-lapisan, yaitu: (a) Sub-lapisan Atas-Atas dan (b) Sub-lapisan Atas-Bawah. Selanjutnya pada lapisan bawah, terdapat: (c) Sub-lapisan Bawah-Atas dan (d) Sub-lapisan Bawah-Bawah. Lebih lanjut, sub lapisan Atas-Bawah (b) dan Sub-lapisan Bawah-Atas (c), kedua sub-lapisan ini terletak berbatas, dibagian tengah piramida social, pada hakekatnya adalah suatu lapisan baru, yaitu Lapisan-Tengah. Dengan demikian, masyarakat bahari (pesisir) tersusun atas tiga lapisan, yaitu: Lapisan-Atas, Lapisan-Tengah, dan Lapisan-Bawah.

2.2 Kemiskinan

Sudah banyak konsepsi pembangunan perdesaan yang dirumuskan, baik melalui pendekatan sektoral maupun lintas sektoral, yang semuanya bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan, memperkuat perekonomian masyarakat di wilayahnya dan mengentaskan mereka yang tergolong "miskin" dari jeratan kemiskinan yang berkelanjutan (Erwidodo, 1999).

Sebenarnya, ada dua jenis "*school of thought*" yang hidup dikalangan para pakar dan aktivis LSM dalam upaya memahami substansi dari kemiskinan di Indonesia (Soetrisno, 1999). **Pertama**, kelompok pakar dan aktivis LSM yang mengikuti pikiran dari kelompok yang disebut sebagai kelompok *agrarian populism*. Inti dari pemikiran kelompok ini adalah bahwa kemiskinan itu pada hakekatnya adalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya

masyarakat perdesaan. Kelompok ini juga melihat bahwa orang miskin itu mampu membangun diri sendiri apabila pemerintah mau memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengatur diri sendiri. Pemikiran kelompok ini terhadap kemiskinan ditandai dengan suatu ideologi *antistatetism*. **Kedua**, kelompok kedua ini biasanya terdiri dari para pejabat yang melihat bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikan rendah. Disamping itu, kelompok ini juga mengkaitkan kemiskinan dengan kualitas sumberdaya manusia.

2.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan terkait erat dengan strategi pembangunan perdesaan, karena pada umumnya penduduk miskin terkonsentrasi dipedesaan, untuk itu urgen dikemukakan sekilas tentang strategi pembangunan pedesaan seperti yang disinyalir oleh John C. Ickis (1990) dalam: “*Structural Responses to New Rural Development Strategies*” yang diadaptasi oleh Supriatna (2000). Terdapat empat strategi yang dipergunakan pemerintah negara-negara sedang berkembang dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perdesaan. Keempat strategi itu adalah:

1. *The Growth Strategy* (Strategi Pertumbuhan);

Strategi pertumbuhan pada umumnya bermaksud untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan konsumsi masyarakat;

2. *The Welfare Strategy* (Strategi Kesejahteraan);

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan penduduk daerah perdesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, pembuatan sarana dan prasarana sosial lainnya: transportasi, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya;

3. *The Responsive Strategy* (Strategi Tanggap Kebutuhan Masyarakat);

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang bermaksud untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan akibat tidak tersedianya sumber pada perdesaan yang bersangkutan.

4. *The Integrated or Holistic Strategy* (Strategi Keterpaduan atau Strategi Menyeluruh)

Boediono (1996) menawarkan 7 (tujuh) strategi global atau strategi total untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu:

1. Kegiatan atau strategi kemiskinan hanya akan berjalan baik dan efektif apabila ada suasana tenang dan stabil.
2. Program pengentasan kemiskinan akan efektif apabila pertumbuhan penduduk bisa ditekan.
3. Masalah pelestarian lingkungan. Banyak studi yang menunjukkan

bahwa lingkungan yang tetap lestari dan bisa dijaga dengan baik akan menimbulkan situasi dimana distribusi kesejahteraan antara warga masyarakat makin baik.

4. Program atau kebijaksanaan pengentasan kemiskinan harus merupakan program yang *sustainable* (berkelanjutan).
5. Di masa depan, peranan perencanaan dan pelaksanaan implementasi program secara lokal makin lama makin menonjol, sehingga perlu dilaksanakan dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan yang terdesentralisasi sejauh mungkin.
6. Tekanan yang paling utama seyogianya diberikan pada perbaikan pelakunya, “invest in people”
7. Dalam pelaksanaan kadangkala kita tidak bisa mencapai idealnya, yaitu bahwa seyogianya program pengentasan kemiskinan didasarkan pada *self-help* yang *sustainable*.

2.4 Teori Tindakan Kolektif (*Collective Action Theory*)

Ahli-ahli kelembagaan mengutamakan pandangan tentang eksistensi adanya tindakan kolektif (*collective action*) dari individu-individu di dalam masyarakat. Menurut Samuels (1995; seperti diikuti oleh Prasad: 2003) dalam Yustika (2006) menyimpulkan ada 8 aspek dari ekonomi kelembagaan, dimana salah satu aspek tersebut berkaitan dengan kultur dan kekuasaan (*culture and power*). Aspek ini menentukan cara bagaimana individu berperilaku. Individu-individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilai-nilai sehingga mereka cenderung bertindak secara kolektif daripada pribadi-pribadi.

Dalam studi lain mengenai aksi bersama (*collective action*) yang dilakukan oleh Prasetyamartaty (2006) menunjukkan bahwa dalam temuan empiris di berbagai belahan dunia, baik negara industri maupun negara berkembang, memperlihatkan bahwa karakteristik sumber daya dan karakteristik komunitas mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan baik secara ekologis maupun sosial-ekonomis. Upaya kerjasama sukarela (*voluntary collective choice*) atau aksi bersama (*collective action*) ditemukan di perikanan pantai, perikanan darat, pengelolaan hutan, padang rumput. Pada tipe pengelolaan ini maka sumber daya dianggap sebagai kepemilikan komunal (*communal rights*).

3. Desain Dan Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian menerangkan (*explanatory research*) dan penelitian deskriptif (*descriptive research*).

3.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. *Pertama*, data primer yang diperoleh melalui penelitian empiris pada beberapa rumah tangga miskin dan institusi atau Pemerintah Daerah. *Kedua*, data sekunder (studi dokumen) yang berasal dari departemen pemerintah (khususnya berkenaan dengan kebijakan pemerintah), lembaga riset, data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan lain-lain.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai alat analisis. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

3.4 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik

pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu :

1. Derajat kepercayaan (*credibility*),
2. Keteralihan (*transferability*),
3. Kebergantungan (*dependability*),
4. Kepastian (*confirmability*)

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Donggala

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan nelayan responden di Kabupaten Donggala, sebab-akibat kemiskinan nelayan dapat dipetakan sebagai berikut:

A. Penyebab kemiskinan

1. Faktor Alam, antara lain:
 - Cuaca; cuaca buruk seperti hujan lebat dan gelombang yang tinggi menyebabkan nelayan tidak dapat melakukan aktivitasnya.
 - Lingkungan pantai yang rusak; terumbu karang yang rusak serta pencemaran menyebabkan berkurangnya ikan yang hidup disekitar pantai.
2. Faktor sumber daya manusia, antara lain:
 - Pendidikan rendah,
 - Keterampilan rendah.
3. Faktor kepemilikan sumberdaya, antara lain:
 - Peralatan sederhana,
 - Modal terbatas.
4. Faktor sosial budaya, antara lain:
 - Kebiasaan hidup apa adanya,
 - Pengembangan diri terbatas,
 - Tidak menginginkan adanya perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat disekitarnya.
5. Faktor kelembagaan, antara lain:
 - Tidak ada wadah yang menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota masyarakat nelayan,
 - Tidak ada kelompok usaha yang terorganisir dengan baik.

B. Akibat yang ditimbulkan

1. Jam kerja rendah, hal ini ditandai dengan seringnya tidak melakukan aktivitas karena gangguan cuaca buruk. Hal ini terjadi karena peralatan yang digunakan sangat sederhana,
2. Peralatan yang digunakan masih tradisional, hal ini disebabkan oleh tidak adanya akses terhadap perubahan dan perkembangan teknologi,
3. Produksi rendah, hal ini ditandai dengan hasil yang diperoleh sangat kurang/sedikit. Hal ini terjadi karena peralatan yang digunakan sangat sederhana, modal terbatas, serta keterampilan yang terbatas,
4. Harga jual rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pasar. Penjualan hasil produksi dilakukan ke tetangga atau masyarakat disekitarnya atau ke tengkulak dengan harga rendah,
5. Beban tanggungan relatif besar, hal ini disebabkan oleh karena pekerjaan mencari nafkah hanya dikerjakan oleh kepala keluarga,
6. Akses terhadap permodalan terbatas, hal ini ditandai dengan tidak dimungkinkannya nelayan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan atau perbankan. Pinjaman biasanya diberikan oleh rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, dan pola pengembalian dengan membeli hasil produksi dengan harga yang relative rendah.

4.2 Pemberdayaan Nelayan Yang Telah Dilakukan Pada Kabupaten Donggala dan Kelemahannya

Strategi pemberdayaan nelayan di Kabupaten Donggala yang ada saat ini dikelola oleh pemerintah pusat melalui program PNPM-Mandiri sementara pemerintah Kabupaten melalui penyusunan *Grand Strategi* penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh *Kelompok Kerja* penanggulangan

kemiskinan. Program-program yang telah dilakukan antara lain:

- perluasan akses permodalan melalui fasilitasi kredit usaha perikanan,
- perlindungan masyarakat miskin dari ancaman *illegal fishing*,
- bantuan langsung penediaan sarana produksi,
- peningkatan keterampilan dan perluasan akses usaha,
- bantuan langsung perbaikan perumahan,
- bantuan langsung modal kerja,
- bantuan langsung bahan makanan,
- bantuan langsung biaya pendidikan dan kesehatan.

Disamping program-program yang telah ada, pemerintah Kabupaten Donggala telah merancang kegiatan tambahan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan nelayan antara lain:

- pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut,
- pengembangan manajemen pengelolaan pesisir dan laut,
- pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir,
- pemberian bantuan alat tangkap bagi nelayan tidak mampu,
- pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap,
- pendampingan pada kelompok nelayan budidaya,
- kajian optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan.

Strategi pemberdayaan nelayan yang telah disusun dalam berbagai program tersebut baik yang telah dilaksanakan maupun yang baru dirancang mengandung banyak kelemahan. Adapun kelemahan program-program tersebut antara lain:

1. Program tersebut membutuhkan banyak sumber daya (sumber daya manusia dan dana) sehingga pelaksanaan dilakukan secara parsial, tidak dapat dilakukan secara serentak

untuk semua masyarakat miskin). Kondisi ini akan menimbulkan banyak masalah seperti adanya kecemburuan antar kelompok masyarakat, munculnya kejenuhan dari para petugas dilapangan, bila ada diantara nelayan yang gagal akan muncul perilaku yang skeptis-kurang percaya akan keberhasilan program tersebut- yang pada gilirannya tidak lagi mendapat respon dari masyarakat dan akhirnya gagal.

2. Karena dilakukan secara parsial akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merealisasikannya, sehingga belum dilakukan evaluasi terhadap program tersebut sudah muncul program baru, karena kegagalan yang terjadi secara parsial menimbulkan persepsi bahwa program tersebut telah gagal.
3. Karena program tersebut tidak mengakar pada budaya masyarakat, muncul sifat apatis dari masyarakat yang menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah bagian dari kontrak politik mereka dengan masyarakat, sehingga yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah, jika itu gagal maka yang gagal adalah pemerintahan yang berkuasa, masyarakat hanya menerima apa yang diberikan, bukan merasakan apa yang akan diberikan.

4.3 Tindakan Kolektif Sebagai Strategi Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Donggala

Berdasar pada beberapa hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan hasil pengamatan yang dilakukan pada penelitian pemberdayaan nelayan pada Kabupaten Donggala yang menekankan adanya aksi bersama atau pada penelitian ini disebut sebagai tindakan bersama adalah sebagai berikut:

Pertama; membangun kawasan/zona bagi setiap jenis usaha perikanan.

Kawasan tersebut terdiri dari; zona usaha perikanan budidaya, zona usaha perikanan tanpa perahu, zona usaha perikanan perahu tak bermotor, zona usaha perikanan motor tempel, dan zona usaha perikanan kapal motor. Zona tersebut akan membentuk komunitas dengan usaha yang sama dengan demikian setiap anggota komunitas merasa memiliki nasib yang sama serta yang digantungkan pada kawasan tersebut.

Kedua; membentuk kelompok tani-nelayan sebagai wadah usaha bersama yang anggota yang beranggotakan Rumah Tangga Perikanan dengan jenis usaha perikanan yang sama.

Wadah tersebut akan mendorong adanya kerjasama baik dalam domain ekonomi maupun politik. Pada tataran domain ekonomi kelompok tani-nelayan akan melahirkan usaha perikanan yang melibatkan lebih banyak anggota sehingga dimungkinkan adanya pembagian kerja, dengan demikian akan menjadikan usaha perikanan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Secara parsial antar kelompok tani-nelayan dengan jenis usaha yang sama dapat berbagi pengalaman, belajar dari keberhasilan dan kegagalan dari kelompok lainnya, mudah mengakses informasi pasar maupun perkembangan teknologi yang terkait dengan usaha perikanan pada kelompok tersebut.

Keempat; memperkuat kapasitas dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada RTP dalam sistem perencanaan pembangunan.

Pelibatan RTP dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian dari pemanfaatan modal sosial (*social capital*) dalam proses pembangunan. Modal sosial merujuk pada hubungan kepercayaan, kebersamaan dan pertukaran, aturan dan

norma bersama, keterkaitan, dan jaringan di dalam masyarakat memungkinkan setiap anggota masyarakat melakukan aksi bersama/tindakan kolektif dalam mengamankan sumber daya penting yang lain (seperti akses pasar, sumber keuangan, pengetahuan).

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

1. Program-program pemberdayaan nelayan di Kabupaten Donggala yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah
2. Strategi pemberdayaan nelayan di Kabupaten Donggala melalui pendekatan tindakan kolektif menjadi suatu alternatif kebijakan guna menutupi kelemahan-kelemahan program-program yang telah dilaksanakan.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasar pada hasil penelitian ini, direkomendasikan program pemberdayaan nelayan sebagai berikut:

1. Membangun kawasan/zona bagi setiap jenis usaha perikanan.
2. Membentuk kelompok tani-nelayan sebagai wadah usaha bersama yang anggota yang beranggotakan Rumah Tangga Perikanan dengan jenis usaha perikanan yang sama.
3. Membentuk koperasi nelayan yang beranggotakan RTP dan dikelola oleh RTP.
4. Memperkuat kapasitas dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada RTP dalam sistem perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Dadang, 1999, "*Pengantar Wilayah Pesisir*", Pelatihan

-
- Singkat Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Pesisir & Lahan, Diselenggarakan oleh PSL Lemlit Unhas Kerjasama dengan Bapedal Jakarta, U. Pandang, 10-22 Mei
- Arifin, Bustanul., 2006, “Kemiskinan, Bank Dunia, dan Revitalisasi Pertanian”, (Kompas: 11 Desember, Hal.1), Jakarta
- Arifin, Taslim, 2006, “Nelayan, Kemiskinan, Dan Pembangunan”, Penerbit Masagena Press, Cetakan Pertama, Juli, Makassar
- Barros, Ricardo., Louise Fox, and Rosane Mendoca, 1997., “Female-Headed Households, Poverty, and the Welfare of Children in Urban Brazil”, *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 45. No. 2
- Bengen, Dietrich G., dan Achmad Rizal, 2002, “Membangun Wawasan Kelautan dan Kemitraan bagi Pemulihan Ekonomi Nasional”, Warta Pesisir dan Kelautan, Edisi Nomor 01/Th.IV, PKSPL-IPB, Bogor
- Besley, Timothy, and Alec R. Levenson, 1996, “The Role of Informal Finance in Household Capital Accumulation: Evidence from Taiwan”, *The Economic Journal*, Vol. 106. No. 43, January
- Dahuri, Rokhmin, 2004, “Pembangunan Kelautan dalam Perspektif Parpol”, (Kompas: Rabu, 14 April), Jakarta
- Demmalino, Eymal B., 1997, “Transformasi Sosio Kultural Model Pengembangan Masyarakat Nelayan”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung
- Dornbusch, Rudiger, and Alejandro Reynoso, 1989, “Financial Factors in Economics Development”, *The American Economic Review*, Nashville, New York, vol.79 No.2, May
- Fattah, Madukallang, 1999, “Perilaku Ekonomi Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus pada Dua Tipe Desa Masyarakat Suku Tolare di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah”, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
- Fortin, Bernard., and Guy Lacroix, 1997, “A Test of the Unitary and Collective Models of Household Labour Supply”, *The Economic Journal*, Vol. 107. No. 443. July
- Gurley, J., and E. Shaw, 1955, “Financial Aspect of Economic Development”, *American Economic Review* 45, September
- Hadiwigeno, Soetatwo, 1985, “Masalah Pembangunan Pedesaan”, *dalam* Hendra Esmara, “Memelihara Momentum Pembangunan”, PT. Gramedia, Jakarta
- Hendayana, Rachmat. 1990. “Peranan Kredit Usaha Tani (KUT) Terhadap Peningkatan Produksi, Perubahan Teknologi, Pendapatan dan Distribusi Pendapatan Usahatani (Suatu Kasus di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)”, Tesis S2, PPS UGM, Yogyakarta.
- Horioka, Charles Yuji., and Wako Watanabe, 1997, “Why Do People Save ? A Micro-Analysis of Motives for Household Saving in Japan”, *The Economic Journal*, Vol. 107, No. 442, May
- Huffman, Wallace E, 1980, “Farm and Off-Farm Work Decisions: The Role of Human Capital”, *The Review of Economic and Statistics*, Vol. 12
- Kompas, 2006, “Separuh Penduduk Masih Rentan Menjadi Miskin”, (Jum’at ; 8 Desember), Jakarta
-

-
- Kusnadi, 2003, “*Akar Kemiskinan Nelayan*”, LKiS, Cetakan I, September, Yogyakarta
- Lanjouw, Peter., and Martin Ravallion, 1995, “Poverty and Household Size”, *The Economic Journal*, Vol. 105. No. 443, November
- Martowijoyo, Sumantoro, 2002, “Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan”, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, No.5, Th.I, Juli, AKATIGA, Bandung
- Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove, 1984, “*Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*”, Penerbit CV. Rajawali, Cetakan Pertama, Juni, Jakarta
- Mukhlis (Editor), 1989, “*Persepsi Sejarah Kawasan Pantai*”, P3MP Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
- Mulyadi S., 2005, “*EKONOMI KELAUTAN*”, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Edisi I, Cet. I, Jakarta
- Nasution, Darmin, 1999, “*Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Dan Kesenjangan di Indonesia*”, dalam Awan Setya Dewanta, dkk (Editor), “*Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia*”, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta
- Nikijuluw, Victor P.H., 2005, “*Politik Ekonomi Perikanan: Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan ?*”, PT. Feraco, Cetakan Pertama, Agustus, Jakarta